



# **SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI e-Musrenbang**

Oleh :  
**OKTORIALDI**  
Direktur Pengembangan Wilayah  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



# PENDAHULUAN



# PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



- ❑ Amanat konstitusi menegaskan bahwa **ANGGARAN NEGARA** adalah **INSTRUMEN** untuk mencapai **tujuan nasional**.
- ❑ Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh **TUJUAN** yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*).
- ❑ Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan **EFISIENSI, EFEKTIVITAS** dan **KEADILAN** alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
- ❑ Proses perencanaan dan penganggaran adalah **OPTIMALISASI SUMBERDAYA** (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki **KUALITAS BELANJA**.



# ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)



- ❑ **TEMA RKP 2017:**  
**“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.**
- ❑ Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- ❑ Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***.
- ❑ Memangkas program yang nomenklaturinya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.

# PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017

- UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 4 ayat 3)
  - RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, **kewilayahan** dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (*goal*) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.
- Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.



**PENDEKATAN PEMBANGUNAN :  
HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL**

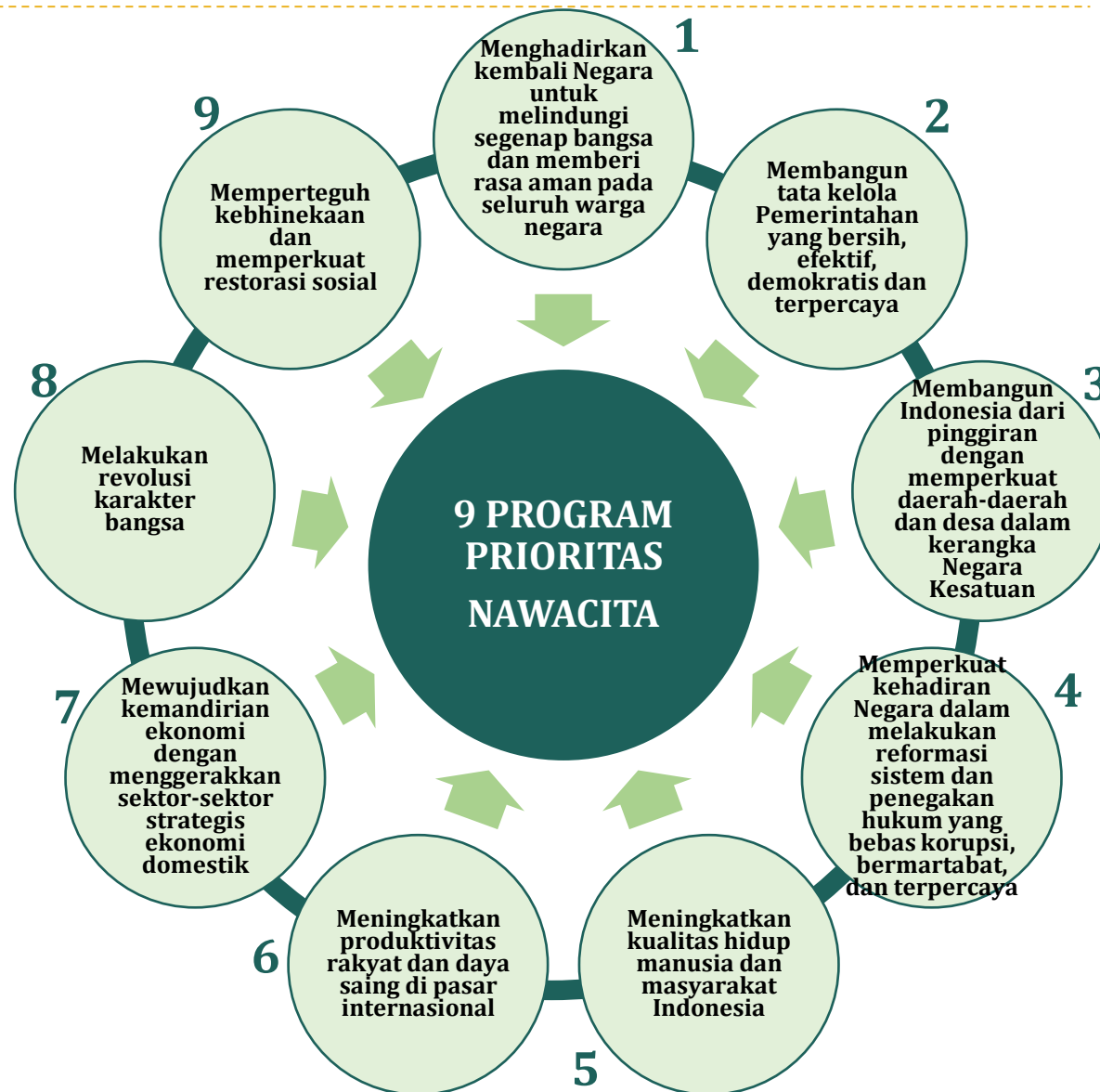


# VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 - 2019

## VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui **7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.





# STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TEMA RKP 2017



## Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:

- a. Pembangunan bersifat **holistik komprehensif** memperhatikan seluruh dimensi terkait
- b. Pembangunan **untuk manusia dan masyarakat** harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
- c. Pembangunan **tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar**
- d. Pembangunan **tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem**
- e. Pembangunan harus mendorong **tumbuh berkembangnya swasta** dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA *Nawacita 8&9*

Revolusi Mental

*Nawacita 5* Pendidikan  
Kesehatan  
Perumahan

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR LINGGILAN

Kedaulatan Pangan  
Kedaulatan Energi dan  
Ketenagalistrikan  
Kemaritiman dan Kelautan  
Pariwisata & Industri

### DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

*Nawacita 3*  
Antarkelompok Pendapatan  
Antarwilayah: (1) Desa; (2)  
Perbatasan; (3) Tertinggal; (4)  
Perkotaan

*Nawacita 4*  
Kepastian dan Penegakan  
Hukum

*Nawacita 1* **KONDISI PERLU**  
Keamanan dan Ketertiban

*Nawacita 9*  
Politik dan Demokrasi

*Nawacita 2*  
Tata Kelola dan Reformasi  
Birokrasi

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

RKP 2015\*)

MELANJUTKAN REFORMASI  
BAGI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT  
PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR UNTUK  
MEMPERKUAT FONDASI  
PEMBANGUNAN YANG  
BERKUALITAS

RKP 2017

**MEMACU PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI  
UNTUK MENINGKATKAN  
KESEMPATAN KERJA SERTA  
MENGURANGI KEMISKINAN DAN  
KESENJANGAN ANTARWILAYAH**

RKP 2018

*Ditentukan dalam  
proses penyusunan  
RKP 2018*

RKP 2019

*Ditentukan dalam  
proses penyusunan  
RKP 2019*

\*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015



# PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (1/2)

## ❑ Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan


### ❑ Mempunyai multitarget (banyak sasaran)

#### ❖ Sasaran Pokok, antara lain :

- Peningkatan produksi padi,
- Peningkatan produksi jagung,
- Peningkatan produksi ikan dll.

#### ❖ Kegiatan Prioritas antara lain :

1. Reforma agraria
2. Stop konversi lahan produktif
3. Pemulihan kesuburan lahan
4. Pembangunan desa mandiri benih
5. Pengembangan pertanian organik
6. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
7. Pengendalian harga dan impor pangan
8. Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)



**Prioritas Nasional, Sasaran Pokok** serta **Kegiatan Prioritas** telah tertuang dalam :

- **Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla**
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019**



# PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI, SPASIAL (2/2)



- ❑ Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- ❑ Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- ❑ Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.

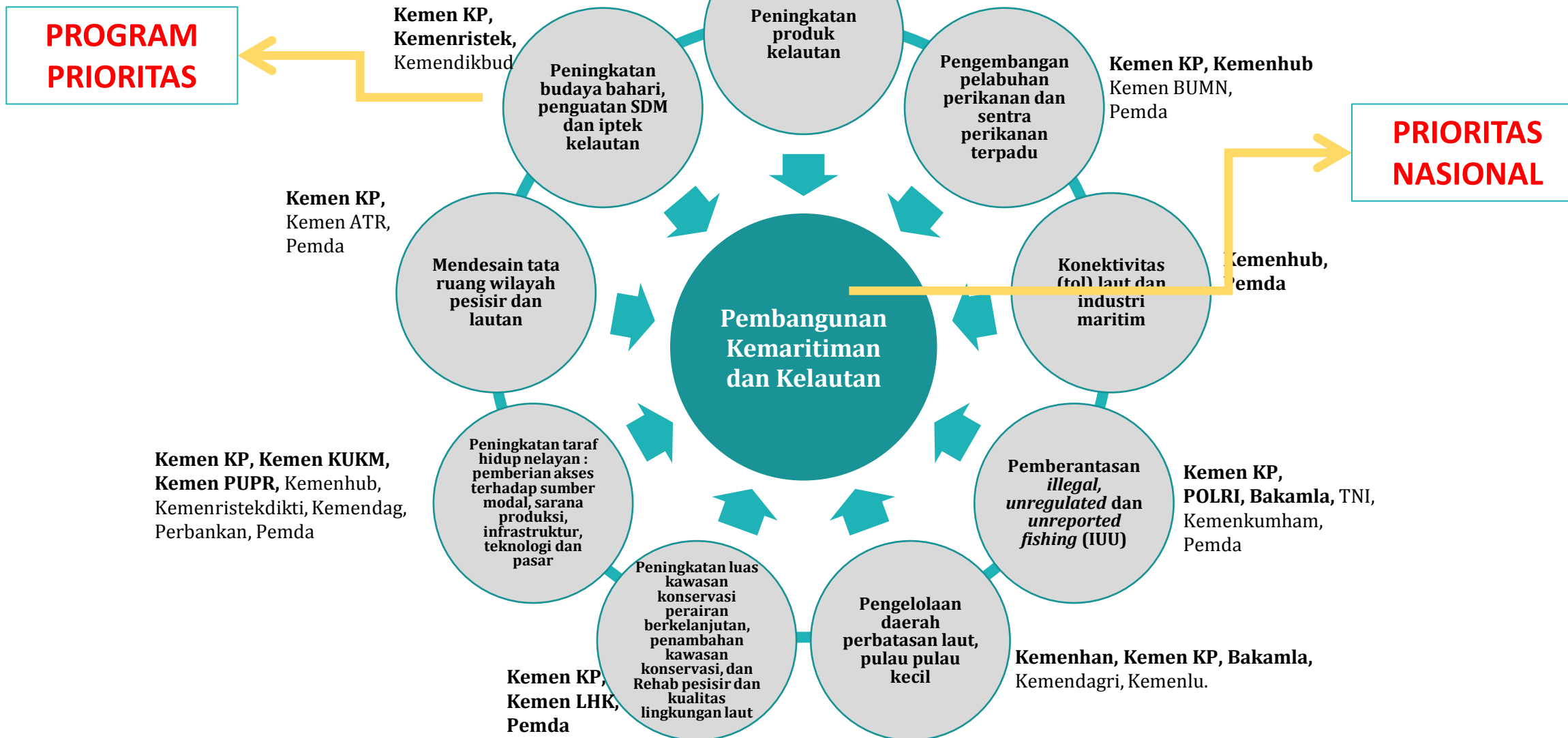


# PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

## Perencanaan Terintegrasi



LEVEL 1





# PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

## Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim



LEVEL 2





## **INTEGRASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH**



# BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR

- ❑ Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu, usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
- ❑ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil pembangunan. Sehingga hanya program-program yang akan memperoleh prioritas pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
- ❑ Selama ini, pembahasan dan pengusulan anggaran Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral per Kementerian/Lembaga (SKPD). Padahal, banyak sasaran/target program di K/L (SKPD) sektor yang memerlukan dukungan kegiatan dari K/L (SKPD) lain, namun K/L (SKPD) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk mengkoordinasikan K/L lain.
- ❑ Hanya Kementerian PPN/Bappenas (Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai **koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD)**. → Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.



# KESIAPAN BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN



- ❑ Yang telah dan akan disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP 2017 :
  - ❑ Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017.
  - ❑ Memetakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan agar program prioritas dapat terlaksana → Prioritas Nasional dan program prioritas telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dan RPJMN 2015-2019 (*bersifat given*).
  - ❑ Memetakan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas.
- ❑ Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan *money follow program*, Bappenas telah menyiapkan :
  - ❑ Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas.
  - ❑ Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)
  - ❑ **Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program** didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum *Multilateral Meeting*.



# PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK Mendukung BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (1/3)



## PRIORITAS

- Revolusi Mental
- Pelayanan Pendidikan
- Pelayanan Kesehatan
- Perumahan dan Permukiman
- Kedaulatan Pangan**
- Kedaulatan Energi
- Kemaritiman dan Kelautan
- Antar Kelompok Pendapatan
- Daerah Perbatasan
- Daerah Tertinggal
- Desa dan Kawasan Pedesaan
- Perkotaan
- Keamanan dan Ketertiban
- Kepastian dan Penegakan Hukum
- Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
- Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
- Pembangunan Pariwisata



**Agenda Prioritas Nasional**

## Prioritas Pembangunan : Kedaulatan Pangan

### Langkah 1 - Penentuan Sasaran Pokok RPJMN :

No	Indikator	Target Capaian					Keterangan	Aksi
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Produksi pangan utama : Padi (juta ton)	74,99 Juta Ton	76,2 Juta Ton	77,21 Juta Ton	-	82,0 Juta Ton		
2	Produksi pangan lainnya/diversifikasi pangan : jagung (juta ton)	19,83* Juta Ton	21,4 Juta Ton	23,8 Juta Ton	-	26,5 Juta Ton		
3	Produksi pangan lainnya/diversifikasi pangan : kedelai (juta ton)	0,98* Juta Ton	1,5 Juta Ton	1,66 Juta Ton	-	2,6 Juta Ton		
4	Produksi gula (juta ton)	2,56** Juta Ton	3,3 Juta Ton	3,30 Juta Ton	-	3,8 Juta Ton		
5	Produksi sumber protein : daging sapi (juta ton)	0,42* Juta Ton	0,59 Juta Ton	0,62 Juta Ton	-	0,76 Juta Ton		
6	Produksi sumber protein : ikan (juta ton)	13,6 Juta Ton	14,8 Juta Ton	16,0 Juta Ton	17,4 juta ton	18,8 Juta Ton		
7	Skor PPH	-	-	88,4	-	92,5		
8	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)*	9,08 Juta ha	9,17 Juta ha	9,17 Juta ha	-	9,89 Juta ha		
9	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)**	0,48 Juta ha	0,3 Juta ha	3,35 Juta ha	-	3,01 Juta ha		
10	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)*	195,58 Ribu ha	203,18 Ribu ha	203,54 Ribu ha	-	304,75 Ribu ha		
11	Pembangunan waduk* (unit)	13	8	30	-	49		



**Sasaran  
Agenda  
Prioritas  
Nasional**

### Langkah 2 - Penentuan Program Prioritas (FORM A)

1. Pengendalian Harga dan Impor Pangan.
2. Reforma Agraria
3. Stop Konversi Lahan Produktif.
4. Pembangunan Desa Mandiri Benih
5. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)
6. Pengembangan Pertanian Organik
7. Peningkatan Produksi Ikan, Garam, dan Rumput Laut
8. Pemulihan Kesuburan Lahan



**Program  
Prioritas**



# PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK Mendukung BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (2/3)



- Antar Kelompok Pendapatan
- Daerah Perbatasan
- Daerah Tertinggal
- Desa dan Kawasan Pedesaan
- Perkotaan
- Keamanan dan Ketertiban
- Kepastian dan Penegakan Hukum
- Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
- Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
- Pembangunan Pariwisata

6	Produksi sumber protein : ikan (juta ton)	13,6 Juta Ton	14,8 Juta Ton	16,0 Juta Ton	17,4 juta ton	18,8 Juta Ton		
7	Skor PPH	-	-	88,4	-	92,5		
8	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)*	9,08 Juta ha	9,17 Juta ha	9,17 Juta ha	-	9,89 Juta ha		
9	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)**	0,48 Juta ha	0,3 Juta ha	3,35 Juta ha	-	3,01 Juta ha		
10	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)*	195,58 Ribu ha	203,18 Ribu ha	203,54 Ribu ha	-	304,75 Ribu ha		
11	Pembangunan waduk* (unit)	13	8	30	-	49		

## Langkah 2 - Penentuan Program Prioritas (FORM A)

1. Pengendalian Harga dan Impor Pangan.
2. Reforma Agraria
3. Stop Konversi Lahan Produktif.
4. Pembangunan Desa Mandiri Benih

## 5. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

### Langkah 3 - Penentuan Kegiatan - Kegiatan Prioritas (FORM A)

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit
2. Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk
3. Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
4. Pengembangan Budidaya Padi, Pengembangan Pertanian Padi Organik
5. Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)
6. Technopark dan Science Park, Pengembangan Balai Penyuluhan
7. Pembangunan Pasar Tradisional
8. Pembelian Beras/Gabah Petani
9. Pencetakan Sawah Baru

6. Pengembangan Pertanian Organik
7. Peningkatan Produksi Ikan, Garam, dan Rumput Laut
8. Pemulihan Kesuburan Lahan

**Kegiatan Prioritas**





# PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK Mendukung BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (3/3)



[← Kembali](#)

[Home](#) / [Serial Workshop](#) / [Pembahasan](#)

## Langkah 4 : Penentuan Detail Kegiatan Pendukung

**Prioritas Pembangunan :** Kedaulatan Pangan

**Kegiatan Utama :** Peningkatan Produksi Ikan, Garam, dan Rumput Laut

**Kegiatan Pendukung :** Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar, Air Payau, Minapolitan dan Tambak.

**Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator**

**Menjadi keluaran matriks sebagaimana contoh pada slide 15-17**

Program & Kegiatan K/L (FORM B)

Kerangka Pendanaan (FORM C)

Kerangka Regulasi (FORM D)

Kerangka Kelembagaan (FORM E)

No	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi Total (Juta)	Aksi	Pengisi
1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah kawasan budidaya yang prasarannya mampu operasional secara tepat guna (*)	Belum Ditentukan : Belum Ditentukan	40 kawasan	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (*)	Belum Ditentukan : Belum Ditentukan	250 kelompok	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (*)	Belum Ditentukan : Belum Ditentukan	115 kab/kota (kumulatif)	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Tersedianya sarana di kawasan perikanan budidaya	Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (*)	Belum Ditentukan : Belum Ditentukan	750 kelompok	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan

[← Prev](#)

[Next →](#)

# MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) HASIL APLIKASI SIMU

## PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran subsidi benih dan pupuk	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi	Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ..... Ton Pupuk Urea .....Ton Pupuk TSP ..... Ton Pupuk ZA .....Ton Pupuk Organik	Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:	9,55 Ton Pupuk		
<b>Program Prioritas</b>	<b>Kegiatan Prioritas</b>	<b>"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)</b>		<b>Penyederhanaan Nomenklatur</b>						
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	... buah Waduk yang dibangun dan ... buah Waduk yang terpelihara	Terbangunnya ... buah Waduk dan terpeliharanya .... buah Waduk	Pembangunan Waduk baru, dengan lokasi sbb: ....  Pemeliharaan Waduk eksisting, dengan lokasi sbb: ...	... buah embung baru  ..... buah embung dipelihara		
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Terbangun dan terpeliharanya ... buah Embung	Terbangunnya ... buah Embung dan terpeliharanya .... buah Embung	Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ...  Pemeliharaan Embung, dengan lokasi sbb:....			



# TINDAK LANJUT : SINERGI BAPPENAS - BAPPEDA



## ❑ BAPPENAS

- ❑ Melakukan finalisasi program prioritas dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan dalam pencapaian sasaran agenda prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga melalui *multilateral meeting I*, *bilateral meeting* dan *multilateral meeting II* → Pendekatan *top-down*
- ❑ Pembahasan **indikasi lokasi** dan **indikasi alokasi anggaran per program**
- ❑ Dari sisi perencanaan di pusat (*top-down*), digunakan instrumen Sistem Informasi Multilateral (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)

## ❑ BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- ❑ Dari sisi perencanaan di daerah (*bottom-up*), digunakan instrumen e-musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id>)
- ❑ Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan di daerah (lokasi) dengan pendekatan pencapaian agenda prioritas nasional melalui Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) melalui aplikasi e-Musrenbang.
- ❑ Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk kegiatan dekon dan tugas pembantuan ke daerah melalui menu Usulan Prioritas Pembangunan Daerah (UPPD) melalui aplikasi e-Musrenbang.
- ❑ Melakukan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang.



**CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN  
PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN**



# PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017



Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2019
<b>Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan</b>					
Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton)	70,6	75,0	76,2	<b>77,0</b>	82,0
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:					
- Jagung (Juta Ton)	19,1	19,8	21,4	<b>22,4</b>	24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	0,98	1,50	<b>1,90</b>	2,60
- Produksi Gula (Juta Ton)	2,6	2,6*	2,8	<b>3,0</b>	3,8
Produksi Sumber Protein:					
- Daging Sapi (Juta Ton)	0,45	0,42*	0,59	<b>0,64</b>	0,76
- Ikan (Juta ton)	10,6	13,6	14,8	<b>16,0</b>	18,8
<b>Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:</b>					
- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)	8,90	9,08	9,17	<b>9,52</b>	9,89
- Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)	2,71 (2010-2014)	0,48**	0,30**	<b>0,64**</b>	3,01 (2015-2019)
- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)	189,75	195,58	203,48	<b>229,45</b>	304,75
- Pembangunan waduk ( <i>groundbreaking</i> )	16 ( <i>on going</i> )	13	8	<b>9</b>	49 (2015-2019)

\* Angka Sementara; \*\* Angka Tahunan

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi

Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

## Arah Kebijakan:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi:** (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan
- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

## Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta "*Food Waste*" di meja makan
- Mendorong kreativitas dan inovasi
- Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
- Penegakan hukum dan disiplin

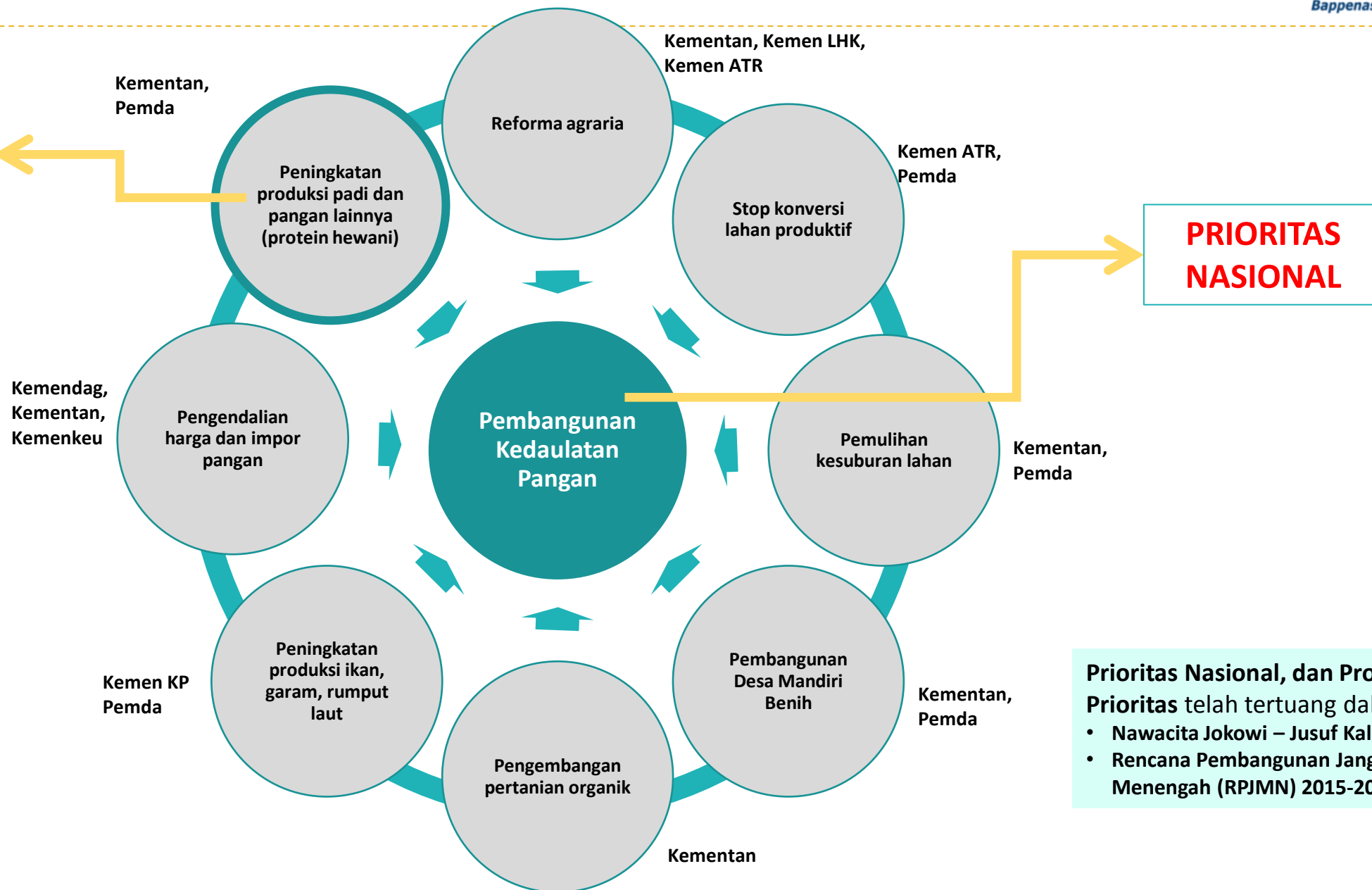


# PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN



LEVEL 1

**PROGRAM  
PRIORITAS**



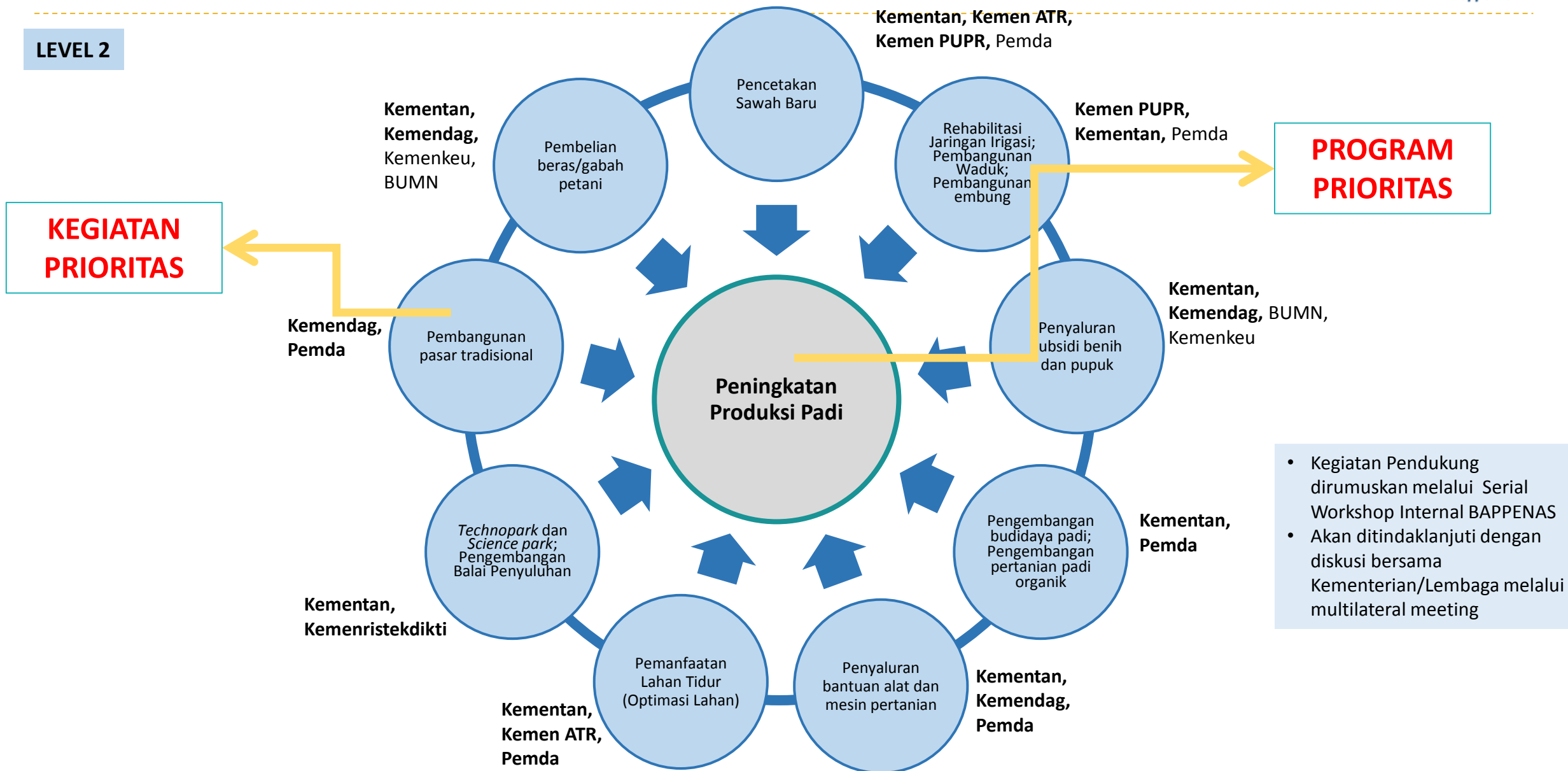
**Prioritas Nasional, dan Program Prioritas** telah tertuang dalam :

- Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019



# PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI

LEVEL 2

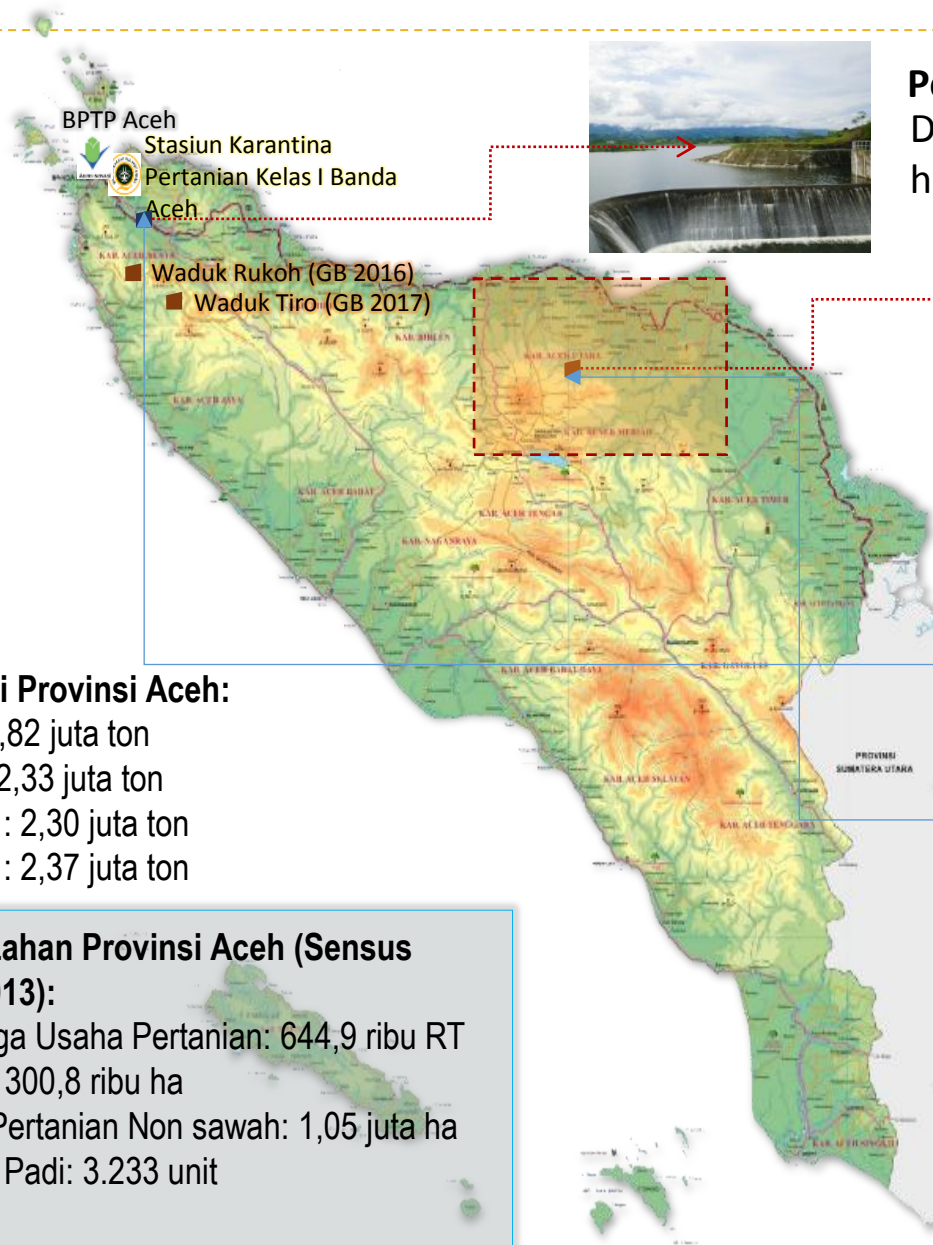


- Kegiatan Pendukung dirumuskan melalui Serial Workshop Internal BAPPENAS
- Akan ditindaklanjuti dengan diskusi bersama Kementerian/Lembaga melalui multilateral meeting



# PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

## Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh



**Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar**  
 DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, *extension*); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).



**Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015**

Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m<sup>3</sup>) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

### Produksi Padi Provinsi Aceh:

ATAP 2014 : 1,82 juta ton  
 ARAM 2015 : 2,33 juta ton  
 Sasaran 2016 : 2,30 juta ton  
 Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

### Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013):

Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT  
 Luas Sawah: 300,8 ribu ha  
 Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha  
 Penggilingan Padi: 3.233 unit

### Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

Aceh Besar 6.000 ha  
 Aceh Jaya 1.000 ha  
 Aceh Timur 8.200 ha  
 Aceh Utara 2.000 ha  
 Pidie 5.500 ha  
 Pidie Jaya 2.300 ha

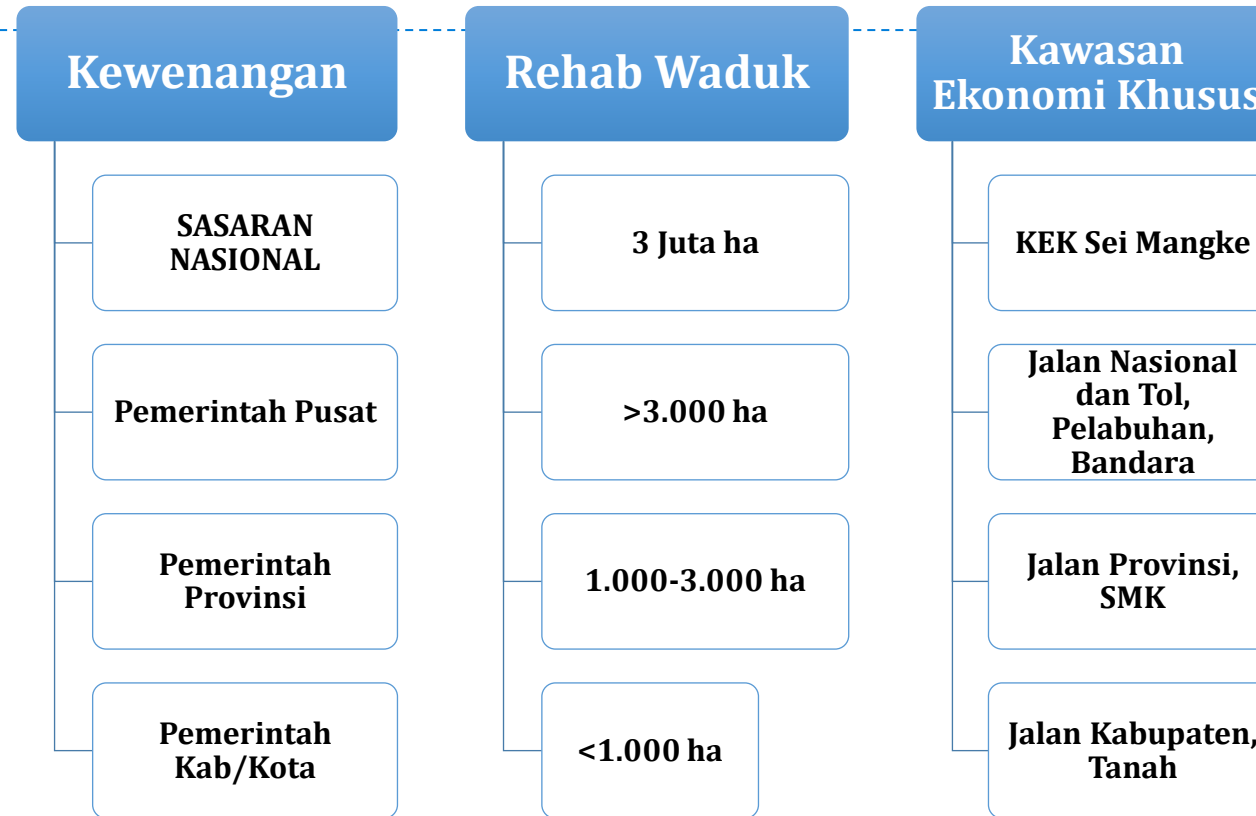
**Cetak Sawah : 14.000 ha**

**Desa Mandiri Benih : 40 Desa**

**Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh**

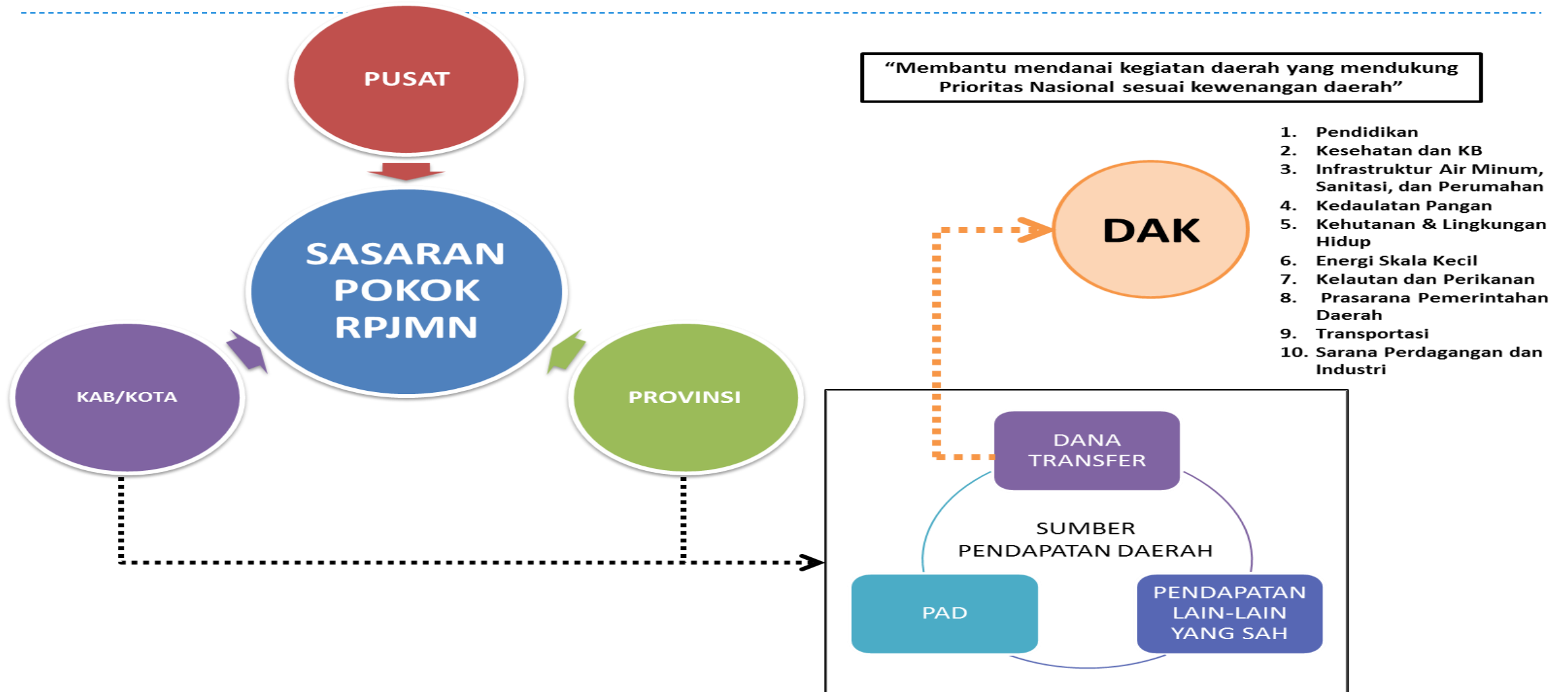
**Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur**

# Hirarki Pencapaian Sasaran DAK



1. Sebagian besar sasaran nasional, harus dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
2. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pencapaian sasaran nasional tidak selalu bisa dipenuhi karena kurangnya pendanaan dari APBD masing-masing.
3. DAK seharusnya diprioritaskan untuk mendanai kekurangan dana dalam pencapaian sasaran nasional tsb.

# ALUR PIKIR DAK IRIGASI



# ILUSTRASI ALOKASI DAK UNTUK REHABILITASI IRIGASI

(CONTOH: SULAWESI UTARA)

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN  
**KEDAULATAN PANGAN**

↓  
**Target RPJMN 2015-2019:**  
Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi.  
**Target RKP 2017:**  
Rehabilitasi 639,700 hektar.



Peta Sasaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2017



Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/KOTA	TARGET REHAB 2017 (ha)	KEBUTUHAN (JUTA RUPIAH)
1	D.I. Sendow	Kab. Minahasa	145.00	3,484.65
2	D.I. Kulo	Kab. Minahasa	173.00	4,142.46
3	D.I. Nuai	Kab. Minahasa	125.00	3,004.62
4	D.I. Mamaya	Kab. Minahasa Tenggara	150.00	2,061.41
5	D.I. Sawangan Kaasar	Kab. Minahasa Utara	100.00	2,061.41
6	D.I. Mopolo	Kab. Minahasa Selatan	50.00	734.30
7	D.I. Kaluntai Atas	Kab. Minahasa Selatan	70.00	903.44
8	D.I. Ranoyapo	Kab. Minahasa Selatan	630.00	8,493.98
9	D.I. Kinali	Kab. Bolaang Mongondow	80.00	1,554.03
10	D.I. Domisil	Kab. Bolaang Mongondow	40.00	863.35
11	D.I. Pinogaluman Monanow	Kab. Bolaang Mongondow	480.00	9,784.65
12	D.I. Kuma	Kab. Kepulauan Sangihe	50.00	3,070.31
13	D.I. Dumagin	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.00	5,507.03
<b>JUMLAH</b>			<b>2,343.00</b>	<b>45,665.64</b>

Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2.343 ha = Rp. 45.665,64 juta  
Kemampuan Pendanaan APBD = Rp. 25.000,00 juta  
Rp. 20.665,64 juta

**Alokasi DAK Irigasi**

# ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI BERDASARKAN SPATIAL PLANNING PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KEK) BITUNG

## PEMBANGUNAN JALAN TOL

URAIAN	TARGET	TAHUN Pengerjaan	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung	7,3 km; 1 paket	2015-2018 2014-2018	RM dan Pinjaman KPS	Manado Bitung Lahan 97%; Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

## PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

URAIAN	TARGET	TAHUN Pengerjaan	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pembangunan PLTU Palu	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan PLTA Poso	N/A	N/A	N/A	N/A

## PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN

URAIAN	TARGET	TAHUN Pengerjaan	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pengembangan Pelabuhan Bitung (TPB)	1 paket	2015-2017	BUMN (PELINDO)	Dalam proses

## REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

URAIAN	TAHUN
Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung	2019

## TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK

URAIAN	TAHUN
pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)	2016

## Dukungan DAK Bidang SARANA PERDAGANGAN & INDUSTRI

- Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa
- Pembangunan Pasar Rakyat
- Pembangunan/ Revitalisasi Sentra IKM (Industri Kecil & Menengah)

## Dukungan DAK Bidang TRANSPORTASI/ SUBBID JALAN

- Pembangunan jalan baru akses menuju kawasan industri
- Pemeliharaan berkala, peningkatan struktur/ kapasitas jalan, misal:
  - Kota Bitung: Jalan Wolter Mongisidi, ruas Bitung-Madidir
  - Kab. Minahasa Utara  
Jalan raya Likupang, ruas: Girian – Danowudu, Danowudu – Duasaudara,

## Dukungan DAK Bidang PENDIDIKAN/ SubBid SMK

- SMK INDUSTRI  
Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa
- Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar/ perpustakaan/ruang praktik siswa/ laboratorium beserta perabotnya

## PENGEMBANGAN BANDARA

URAIAN	TARGET	TAHUN Pengerjaan	SUMBER PENDANAAN	PROGRESS
Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado	N/A	N/A	N/A	N/A

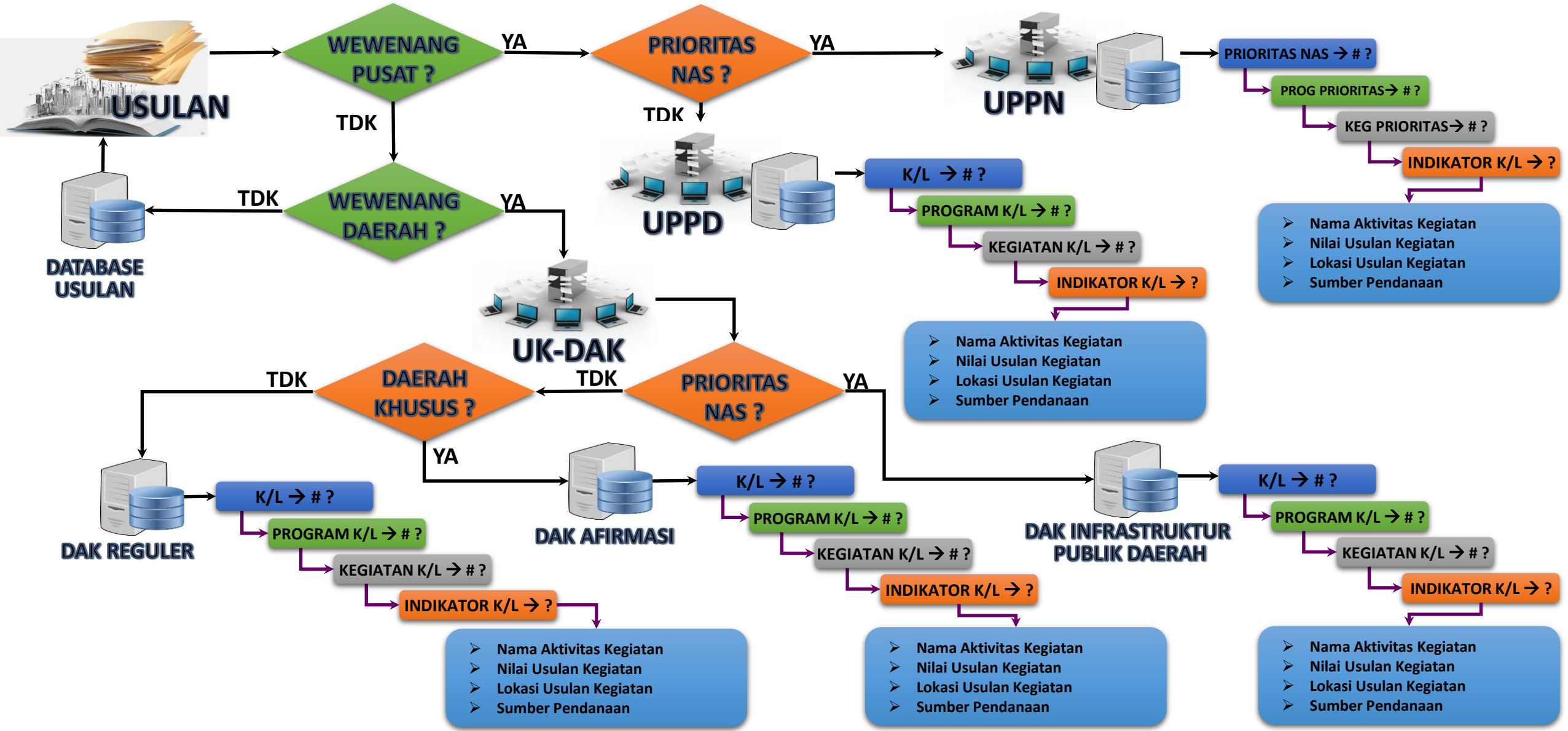


Catatan :

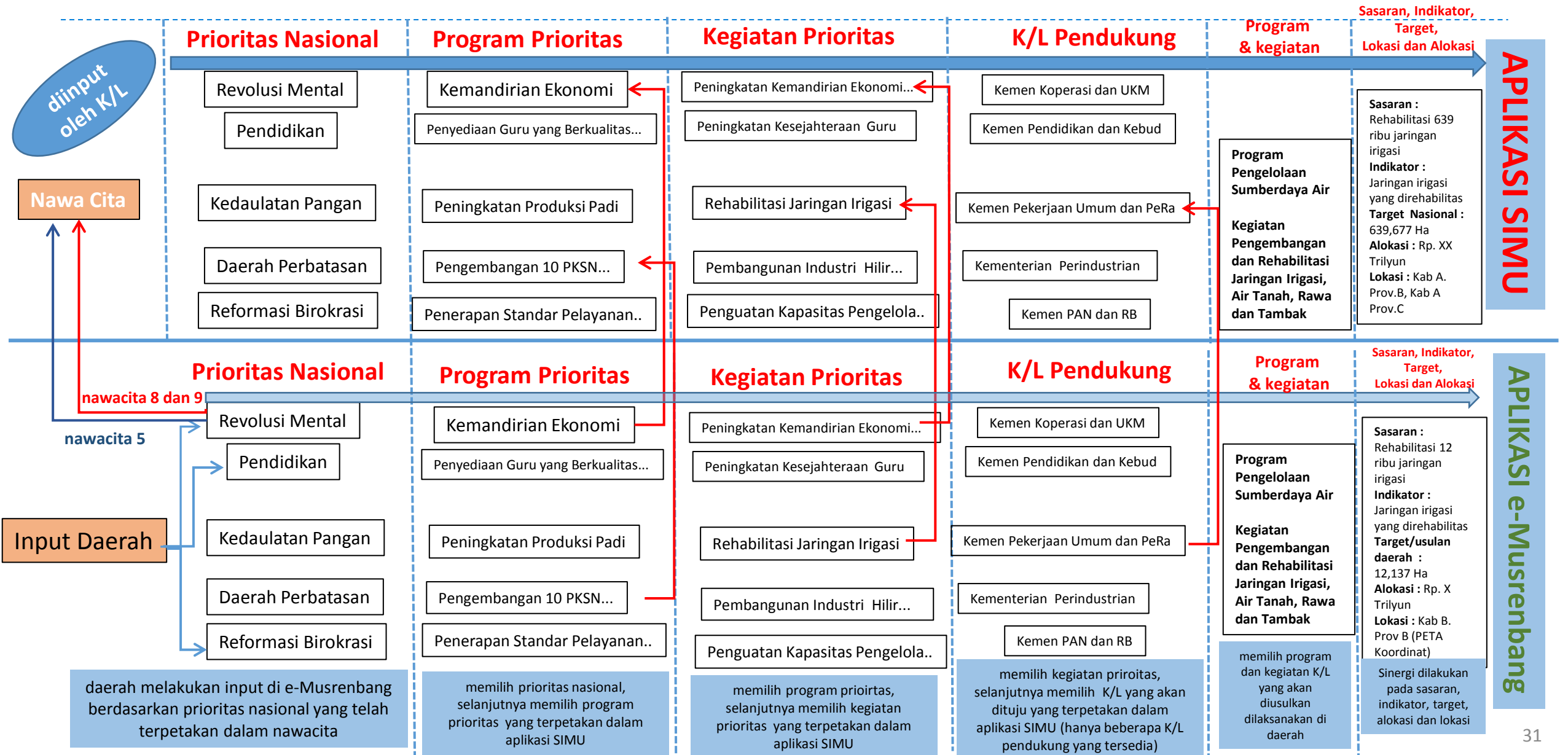
- N/A (not available) perlu diperjelas dalam penyusunan RKP 2017
- Dukungan DAK Jalan hanya ilustrasi

DAK →

# ALUR PIKIR PENYAMPAIAN USULAN e-MUSRENBANG RKP



# SINERGI USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPPN) MELALUI APLIKASI Sistem Informasi Multilateral dan e-Musrenbang



APLIKASI SIMU

APLIKASI e-Musrenbang



## AGENDA PELAKSANAAN

# AGENDA PELAKSANAAN

4 - 11 Mar

## BILATERAL MEETING



### PEMBAHASAN :

- Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 - 2017- dan *Forward Estimate*
- Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)
- Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

### OUTPUT :

- Form B-E
- Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)
- Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

23 - 29 Feb

## MULTILATERAL MEETING I



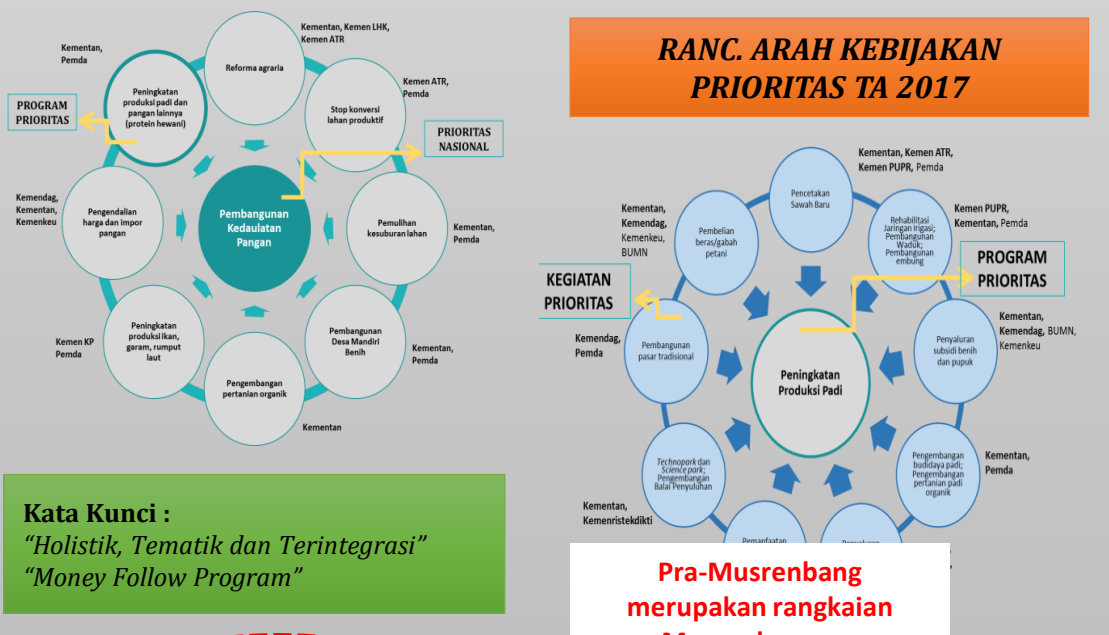
### PEMBAHASAN :

- Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas

### OUTPUT :

- Form A

## RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017



**Pra-Musrenbang merupakan rangkaian Musrenbangs (e-musrenbang sebagai instrumen sinkronisasi)**

31 Mar - 30 Apr

## RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING

Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah

4 - 8 Apr

## MULTILATERAL MEETING II

1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional
2. Penajaman sasaran-target-lokus

31 Mar

## RAKORBANGPUS

1. Penyampaian RA RKP TA 2017
2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas - Menkeu)

29 Mar

## SIDANG KABINET

Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017

Mei

## RANCANGAN RKP

Rancangan RKP

Mei

## PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR

30 Apr s/d akhir Juni

## TRILATERAL MEETING

Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L

Akhir Juni - Awal Juli

## RKP

Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP

# JADWAL PENGISIAN APLIKASI e-Musrenbang

- ❑ Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang (23 Februari 2016)
- ❑ Pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi (24 Februari 2016 – 2 Maret 2016)
  - ❑ *Multilateral Meeting Tahap I di tingkat Pusat*
- ❑ Pengisian dan Verifikasi Tahap Awal (2 Maret 2016 – 2 April 2016)
  - ❑ Input dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota (2 Maret 2016 – 24 Maret 2016)
  - ❑ Verifikasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota (28 Maret 2016 – 1 April 2016)
- ❑ Hasil Input SKPD dan Bappeda Kab/Kota menjadi masukan dalam *Multilateral Meeting Tahap II* ( 4-8 April 2016)
- ❑ Pengisian dan Verifikasi Tahap Akhir (9 April 2016 – 17 April 2016)
  - ❑ Input dan Revisi hanya dapat dilakukan oleh Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi (9 April 2016 – 13 April 2016)
  - ❑ Verifikasi Akhir dilakukan oleh Bappeda Provinsi (13 April 2016 – 17 April 2016)
- ❑ Forum Musrenbang (18 April – 30 April 2016)



**TERIMA KASIH**